

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012.

Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.

Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001.

A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT SOFMEDIA, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, 2010.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia, Jakarta, 2005.

Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

Chaerudin dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Charles Himawan, *Hukum sebagai Panglima*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.

Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

D. Darmodihardjo, *Orientasi Singkat Pancasila*. Dalam Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1979.

Djoko Prakoso, *Eksistensi di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1985.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1956.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK-Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018).

Gatot Supramono, *Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor dan Masalah Keahliannya*, Varia Peradilan Tahun XXVII No.327 Februari 2013

Harkristuti Harkrisnowo, "*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI dalam Majalah KHN Newsletter, Jakarta, 2003.

Hernol Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta 1982.

H.M. Subarna dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, CV. Pustaka Grafika, Jakarta, 2012

ICW, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Maret, 2014.

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.

Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusa Media, Bandung, 1986.

Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009.

MaPPI FH UI, *MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, Jakarta, 2017

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amarta, Semarang, 1971.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Samuel P.Huttington. “Modernisasi dan Korupsi,” *Karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C.Scott, Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

Satochid Kartanegara (tanpa tahun), *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Surachmin-Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo-Undip, Semarang, 2001.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, *Jurnal, Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif*, FH UNS.

Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, Jakarta, 2002.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.

Tim Grahamedia Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.

Website

Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, *Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia*” dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com>

Fence M. Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com>

Syafruddin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com>